

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran paradigma pendidikan dasar dan menengah telah tercermin dalam visi pembangunan pendidikan nasional yang tercantum dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 “mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan berkualitas guna mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, bertanggungjawab, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi”. Amanat dalam GBHN tersebut mengisyaratkan suatu kekhawatiran yang mendalam dari berbagai komponen bangsa terhadap prestasi sistem pendidikan nasional kini tampak mulai menurun dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan mampu bersaing di era tanpa batas ke depan.

Pada masa pemerintahan orde baru kebijakan di bidang pendidikan bersifat sentralistik, semuanya diatur oleh pusat sehingga sekolah-sekolah tinggal melaksanakan kebijakan dari atasan. Akibat sistem sentralistik ini maka kreativitas sekolah terbunuh, warga sekolah tidak berani melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, mereka takut akan bertentangan dengan kebijakan dari pusat.

Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan “*education production function*” atau input-out-put analisis yang tidak dilaksanakan secara konsisten (Diknas, 2002:1). Peran serta warga

sekolah khususnya guru dan masyarakat (orang tua) siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.

Reformasi di bidang pendidikan merupakan sesuatu yang harus dilakukan, Djadja (2002) mengemukakan dua faktor yang melatar belakangi reformasi di bidang pendidikan, yaitu :

1. Faktor eksternal yaitu adanya tuntutan persaingan global di era kesejagatan
2. Faktor internal yaitu perlunya penyesuaian sistem pendidikan dengan kebijakan otonomi daerah yang menuntut adanya desentralisasi bidang pendidikan.

Dengan bergulirnya era otonomi daerah membawa suasana baru di bidang pendidikan. Suasana baru tersebut antara lain berkembangnya pemikiran untuk dilaksanakan desentralisasi pengelolaan pendidikan sejalan dengan dilaksanakannya otonomi daerah.

Desentralisasi pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pendidikan kepada masyarakat, yang akhirnya akan terjadi peningkatan mutu pendidikan. Perubahan yang dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan melalui manajemen pendidikan berbasis sekolah. Pengelolaan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperdayakan sekolah melalui manajemen berbasis sekolah (*school based management*) pada intinya memberikan kewenangan dan pendelegasian kewenangan (*delegation of outhority*) kepada sekolah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan

Otonomi sekolah dengan model manajemen berbasis sekolah sebagai salah satu jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru dan masyarakat adalah pelaku terdepan dalam pendidikan. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah adalah otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif, artinya memberikan otonomi yang lebih luas kepada masing-masing sekolah secara individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Dharma (2003) memandang manajemen berbasis sekolah sebagai alternatif dari pola umum pengorganisasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. Manajemen berbasis sekolah adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah.

Kemandirian disetiap satuan pendidikan adalah salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan sehingga sekolah-sekolah menjadi lembaga yang otonom. Untuk menuju sekolah yang otonom memerlukan jalan panjang, perlu adanya pemahaman konsep otonomi yang benar dan kesiapan dari para pengelola pendidikan, mengingat sekian puluh tahun pendidikan di Indonesia bersifat sentralistik.

Manajemen berbasis sekolah sebagai model pelaksanaan otonomi sekolah merupakan paradigma baru yang diterapkan di sekolah guna mengembalikan sekolah kepada pemiliknya yaitu masyarakat. Masyarakat dan sekolah yang paling bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pendidikan yang

diselenggarakan oleh sekolah-sekolah. Masyarakat dan sekolah yang paling mengetahui persoalan-persoalan pendidikan yang dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan.

Disisi lain guru-gurulah yang paling memahami, mengapa prestasi belajar murid-muridnya menurun, metoda apa yang paling tepat diterapkan, apakah kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Guru-guru dan kepala sekolah dapat bekerjasama memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah dan guru harus dikembangkan dalam melakukan kajian serta analisis agar semakin peka dan memahami dengan cepat cara-cara pemecahan masalah pendidikan di sekolahnya.

Ace Suryadi (2003) menyatakan untuk memecahkan masalah internal sekolah, baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun sumberdaya pendukung cukup dibicarakan ditingkat sekolah dengan masyarakat, tidak perlu diangkat di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah cukup memberikan fasilitas dan bantuan pada saat sekolah mengalami jalan buntu dalam memecahkan masalah.

Sekolah paling memahami permasalahan sekolahnya, karena itu sekolah merupakan unit utama yang harus memecahkan permasalahannya sendiri melalui sejumlah keputusan yang dibuat sedekat mungkin dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, sekolah harus memiliki kewenangan (otonom), tidak saja dalam pengambilan keputusan, akan tetapi justru dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut prakarsa sendiri.

aspirasi warga sekolah sesuai dengan kebijakan makro pendidikan nasional. Perubahan sekolah akan terjadi bila semua warga sekolah merasa memiliki dan rasa memiliki itu berasal dari berpartisipasi dalam merumuskan perubahan keluwesan untuk mengadaptasi terhadap kebutuhan individu sekolah. Rasa memiliki pada gilirannya akan meningkatkan rasa tanggungjawab.

Permasalahan yang sering dihadapi suatu organisasi yang akan memfokuskan pada perubahan adalah kesiapan sumber daya manusia dalam menerima dan memahami perubahan tersebut. Perubahan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang akan mengganggu kontinuitas kerja dan posisi status quo yang telah dinikmati, serta berdampak besar pada kualitas kehidupan kerja.

Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi sekolah dengan model manajemen berbasis sekolah (*school based management*) sebagai salah satu perubahan dalam bidang pendidikan dalam hal ini harus dimulai dari adanya sikap pemahaman, penerimaan, dan kepercayaan guru dan pegawai di masing-masing sekolah. Proses dalam "*managing change*" yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi konsep otonomi sekolah menjadi hal yang sangat menarik

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan otonomi sekolah dengan model manajemen berbasis sekolah (*school based management*) sangat menarik untuk diteliti. Untuk melaksanakan otonomi sekolah tersebut diperlukan kesiapan semua warga sekolah terutama guru untuk memahami, menerima otonomi sekolah sebagai bagian dari perubahan organisasi yang harus disikapi.

Berdasarkan latar belakang di atas , maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman guru terhadap perubahan manajemen sekolah ?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan guru terhadap perubahan manajemen sekolah ?
3. Bagaimana pengaruh kepercayaan guru terhadap perubahan manajemen sekolah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh pemahaman, penerimaan dan kepercayaan terhadap perubahan otonomi sekolah mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh variabel pemahaman guru terhadap perubahan manajemen sekolah.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh variabel penerimaan guru

3. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh variabel kepercayaan guru terhadap perubahan manajemen sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi kepala sekolah, guru dan karyawan, menyadarkan kepada mereka arti penting pemahaman dan besarnya tanggung jawab yang diemban terhadap peningkatan kualitas kehidupan kerja, serta memberikan pengertian kepada guru dan karyawan sebagai tulang punggung keberhasilan peningkatan mutu pendidikan.
2. Memberikan masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan konsep otonomi sekolah dengan mengikutsertakan seluruh komponen yang ada di sekolah.
3. Memberikan tambahan wawasan bagi peneliti dan pelaksanaan otonomi